

**ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBAYARAN *ONLINE*
PEMBUATAN PASPOR (*PAYMENT GATEWAY*)
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA**

Oleh:

Rachmat Reiza Mirhaj

INTISARI

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat, lahirlah sistem pembayaran secara elektronik/*online* di Indonesia. Salah satu contohnya adalah sistem pembayaran paspor secara *online* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan sistem *payment gateway*. Akan tetapi sistem pembayaran ini tidak dapat diteruskan sehingga menimbulkan masalah terkait pemberian pelayanan paspor kepada masyarakat.

Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif – empiris yang mengkaji dan meneliti data hukum sekunder dengan dukungan data primer dari wawancara kualitatif yang dilakukan kepada narasumber terpilih yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pembayaran *online* berbasis *payment gateway* Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan pelayanan prima dan terus memberikan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan paspor. Inovasi pembayaran paspor secara *online* melalui *payment gateway* tidak dapat diteruskan karena dalam mengeluarkan kebijakan, Kementerian Hukum dan HAM RI tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerimaan negara. Untuk dapat melaksanakan pembayaran paspor secara *online* sesuai dengan peraturan yang berlaku pemohon hendaknya tidak dibebankan biaya administrasi.

Kata kunci: sistem pembayaran, *payment gateway*, Imigrasi, Paspor, Pelayanan Prima.

***NORMATIVE ANALYSIS ON PASSPORT ISSUANCE
BY USING PAYMENT GATEWAY TO PROVIDE BETTER PUBLIC SERVICES***

by:

Rachmat Reiza Mirhaj

ABSTRACT

To provide better public services, Indonesia adopts the online payment system. One example is the payment system for issuing passport by payment gateway system who conducted by the Directorate General Immigration. However, the payment system could not be continued, and resulting problems related to the provision of services passport to the public.

The research method is law normative – the empirical study and examine the law secondary data with the support of primary data from qualitative interviews were carried out to selected resource persons relating to the payment gateway system in the Directorate General of Immigration, The Ministry of Law and Human Right of The Republic of Indonesia.

Directorate General of Immigration provide better public services and always make innovation to the public, especially to the passport service. Innovation payment passport online through payment gateway cannot be passed on because in issued of policy, The Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia does not consider to legislation relating to the state revenues. To implement online payment of passport in accordance with the applicable regulation, the applicant should not be charged to pay administrative costs.

Keywords: payment system, payment gateway, Immigration, passport, public service.